BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Perubahan Iklim
Edisi : 1 MEI 2008
Hari : KAMIS
Hal. : 14

Perubahan Iklim

Peta Kerentanan Dampak Belum Dibuat

Jakarta, Kompas - Indonesia, salah satu negara kepulauan dengan risiko tinggi terkena dampak perubahan iklim, hingga kini belum memiliki peta kerentanan. Padahal, peta kerentanan mutlak diperlukan untuk persiapan antisipasi demi keselamatan warga.

"Tak ada peta kerentanan itu," kata pakar perubahan iklim dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Armi Susandi, dalam Bedah Karya Jurnalistik tentang Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, yang diadakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Riau Andalan Pulp and Paper di Jakarta, Selasa (29/4).

Armi, Kepala Program Studi Meteorologi ITB, terlibat dalam penyusunan konsep penanganan perubahan iklim bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan anggota tim Indonesia dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali, Desember lalu.

Asisten Deputi Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Sulistyowati menyatakan, data-data daerah dengan kerentanan tinggi terkena dampak perubahan iklim sudah ada, tetapi belum disusun. "Kami usahakan selesai tahun 2008 ini," katanya. Data-data itu menyangkut kawasan rentan kekeringan, kebakaran hutan, banjir, dan kenaikan muka air laut.

Indonesia sudah memiliki Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim, yang disusun menjelang Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim Desember lalu.

Pakar lingkungan Emil Salim menyatakan, "Jawaban atas dampak perubahan iklim itu juga ada di tengah masyarakat lokal." Komunitas lokal selama ini hidup selaras dengan alam dengan cara mengambil dari alam sesuai kebutuhan. Emisi unsur-unsur berbahaya pembentuk gas rumah kaca justru datang dari kehidupan modern.

"Hutan-hutan terus dibuka untuk perkebunan sawit, pertambangan, dan jalan dalam skala besar. Semua berawal dari cara pandang kita tentang devisa dari ekspor," kata Emil.

Dari simulasi khusus dampak perubahan iklim, Armi mengatakan, dinamika atmosfer di Indonesia mengancam ketahanan pangan. Untuk prioritas penanganannya, dia menyarankan pemerintah fokus pada pengembangan model manajemen air, selain rencana lain. (GSA)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup